

Mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Bura Sendana melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT)

Encouraging the female's participation in managing community forestry of Bura Sendana through establishing a farmers women group

Kasmiati¹✉, Widyanti Utami A², Ikawati Karim¹, Suryani Dewi¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat

²Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat

✉ kasmiati35@gmail.com

doi [10.31605/jtarreang.v1i1.3856](https://doi.org/10.31605/jtarreang.v1i1.3856)

Diterima 23 Mei 2024; Disetujui 18 Juli 2024; Diterbitkan 29 Juli 2024

Abstrac

Based on the results of observations and interviews with our partners, namely the community around the Social Forestry area, Bura Sendana State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) located in Tallambalao Village, Majene Regency, West Sulawesi, it was found that currently, females do not play an optimal role in management of forest products because there are no particular institutions for women. Therefore, women cannot access various formal sources of assistance, information, or capital provided by government agencies, private and other supporting institutions such as non-governmental organizations (NGOs), or universities. Therefore, it is essential to form formal institutions specifically for women. So, the community service partnership activity that we carry out is encouraging the establishment of a Women's Farmers Group (KWT) to manage the Bura Sendana social forestry area. This initiative is expected to support empowered female farmers from a cultural and institutional perspective. Become a pioneer in managing agricultural products from forest areas, which can improve the welfare of people in villages around forest areas in the long term. The main objective of this Community Partnership Program activity is to form a KWT to manage HKM Bura Sendana. Furthermore, we designed a participatory training to strengthen the KWT institutions that have been formed.

Keywords: Forest; Participation; Women's Farmers Group

Abstrak

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan mitra kami yaitu masyarakat yang berada di sekitar kawasan Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKM) Bura Sendana yang berada di Desa Tallambalao, Kabupaen Majene, Sulawesi Barat ditemukan fakta bahwa saat ini perempuan belum berperan optimal dalam pengelolaan hasil hutan karena tidak adanya kelembagaan khusus untuk perempuan. Sehingga perempuan tidak dapat mengakses berbagai sumber bantuan, informasi maupun modal secara formal yang disediakan oleh berbagai instansi baik dari pemerintah, swasta maupun dari institusi pendukung lainnya seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Perguruan Tinggi. Karena itu kami memandang penting membentuk kelembagaan secara formal khusus untuk perempuan. Sehingga kegiatan kemitraan pengabdian yang kami lakukan adalah mendorong terbentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) di area pengelolaan perhutanan sosial Bura Sendana. Prakarsa ini diharapkan mendukung petani perempuan berdaya bukan hanya dari sisi kultural tapi juga secara institusi. KWT Menjadi pionir dalam mengelola hasil pertanian dari kawasan hutan yang dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan. Pencapaian tujuan utama kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini adalah terbentuknya KWT untuk mengelolah HKM Bura Sendana. Selanjutnya merancang bersama secara partisipatif kebutuhan pelatihan untuk penguatan kelembagaan KWT yang sudah terbentuk.

Kata Kunci: Hutan; Kelompok Wanita Tani; Partisipasi



1. Pendahuluan

Perempuan secara kultural terlibat dalam upaya memperjuangkan akses terhadap sumber daya melalui program perhutanan sosial misalnya, termaksud dalam mengelola langsung hasil pertanian. Namun aktivitas perempuan tidak terlembagakan secara formal sehingga sering kali diabaikan atau tidak memperoleh rekognisi yang tepat. Maka mendukung kelembagaan perempuan dalam pengelolaan hasil pertanian dari kawasan hutan di pedesaan menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan sumber daya alam yang inklusif gender, setara, lestari dan berkelanjutan dapat tercapai [1].

Salah satu upaya untuk menampakkan kerja petani perempuan yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) sehingga terbuka jalan dan akses bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan mengakses pengetahuan, informasi, modal maupun *skill* dari berbagai lembaga lainnya. KWT memberikan manfaat positif yakni dengan menjadi ruang belajar melalui kegiatan rutin dan pelatihan dan mampu meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga [2]. Hal ini sejalan dengan [3] bahwa KWT berperan sebagai wahana belajar, wahana kerja sama dan sebagai unit produksi. Begitu pula dengan temuan [4] bahwa eksistensi Kelompok KWT memberikan pengaruh positif bagi para perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan KWT. Hal ini juga bisa menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai bercocok tanam.

Berangkat dari hasil penelitian tersebut, Tim Dosen Fakultas Pertanian dan Kehutanan akan menggunakan pendekatan kelembagaan melalui pembentukan KWT di Desa Tallambalao sebagai situs dimana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan kami lakukan mengingat beberapa kondisi terkini yang sedang dihadapi masyarakat di desa ini yaitu di antaranya adalah desa ini merupakan salah satu desa yang sangat kaya dari sisi sumber daya alam dan menjadi salah satu desa di mana berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang telah memperoleh izin perhutanan sosial. Namun hingga kini hasil pertanian dari kawasan hutan belum dikelola secara optimal terutama kelompok perempuan belum terlibat dalam pengelolaan hasil pertanian dari kawasan hutan yang telah memperoleh izin perhutanan sosial tersebut. Hal ini karena ketiadaan kelembagaan secara formal yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hasil pertanian di kawasan hutan. Dengan demikian pembentukan kelembagaan pertanian yakni KWT menjadi sangat penting. Persoalan penting lainnya adalah belum ada transfer pengetahuan dan teknologi yang signifikan pada masyarakat Desa Tallambalao untuk melakukan pengolahan hasil pertanian pasca panen serta belum adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang telah diperoleh dari kawasan hutan. Karena itu pengabdian ini bertujuan membentuk KWT di Desa Tallambalao sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan. Karena dengan berkelompok, peluang perempuan untuk memperoleh akses mengikuti beragam pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam mengelola hasil hutan menjadi lebih luas.

2. Metode

2.1. Lokasi

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Tallambalao, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dipilih sebagai lokasi pengabdian karena berbatasan langsung, sekaligus bagian dari Hutan Kemasayarakatan (HKM) Bura Sendana. Warga di Desa Tallambalao telah diserahkan hak akses untuk mengelolah perhutanan sosial berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Nomor

8330/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 12/ 2018. Luas HKM Bura Sendana sebanyak 50,25 hektar (ha) namun keterlibatan perempuan masih sangat terbatas terutama dari sisi kelembagaan karena tidak adanya KWT.

2.2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Maret hingga Desember tahun 2023.

2.3. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode dan proses pelaksanaan pengabdian ini didasarkan pada model *Participatory Action Research* (PAR). Secara prinsip pendekatan biasanya digunakan dalam penelitian dengan menekankan pada tindakan kolaboratif yang melibatkan masyarakat atau komunitas setempat sebagai bagian dari proses penelitian. Masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh proses penelitian jadi bukan berperan sebagai objek saja melainkan subjek. Dalam kerja penelitian merupakan bagian tim peneliti dalam berbagai hal atau merupakan *Co-researchers*.

Pendekatan PAR ini kami adopsi dalam melaksanakan kerja pengabdian (*Community service*) di Desa Tallambalao, dengan menerapkan prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam beragam proses kerja pengabdian, mulai dari menganalisis masalah hingga mengupayakan solusi. Kami berupaya menerapkan empat prinsip dasar PAR yaitu pertama, otoritas pengetahuan atau keahlian dibentuk oleh pengalaman langsung. Dalam hal ini mengamini bahwa masyarakat setempat adalah ahli, memiliki otoritas pengetahuan yang sah perihal masalah yang mereka hadapi dan solusi yang mereka harapkan atau pikirkan. Kedua, melihat pengetahuan berada sebagai bagian tidak terpisahkan dari tindakan. Bahwa proses bertindak bersama merupakan bagian dari proses belajar yang melahirkan pengetahuan. Selanjutnya prinsip ketiga, meyakini bahwa penelitian sebagai proses transformatif. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian dilihat sebagai upaya untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Terakhir, menerapkan prinsip kolaboratif melalui dialog. Sehingga percakapan antara seluruh pihak (formal dan tidak formal) bagian integral dari metode kerja pengabdian masyarakat yang dibangun ini [5,6].

3. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial masih menunjukkan adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki [7]. Dimana lebih cenderung menguntungkan kelompok elit, khususnya elit yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga ruang berpartisipasi bagi perempuan menjadi sangat terbatas. Selain proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan juga masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan lebih dikondisikan untuk membuat keputusan dalam ranah domestik [8].

Padahal, pengelolaan sumber daya alam termaksud hutan semestinya memberikan peluang yang sama besarnya bagi setiap warga negara apapun jenis kelaminnya. Karena itu perempuan perlu didorong untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan hutan. Pelibatan perempuan akan membantu mempercepat proses tercapainya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, adil dan memberi manfaat sosial-ekonomi yang bersifat inklusif bagi seluruh anggota masyarakat.

Sebagai upaya mendorong pelibatan perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut, akhirnya kami selaku dosen fakultas pertanian dan kehutanan Universitas Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan yang dapat membantu pembentukan ruang partisipasi bagi perempuan dengan memulai dari pembentukan KWT di wilayah Kelompok Tani Hutan (KTH) Bura Sendana di Kabupaten Majene.

Hal di atas ditujukan untuk membuka ruang partisipasi nominal bagi perempuan dari pembentukan kelompok ruang formal kemudian diupayakan partisipasinya meningkat yang pada akhirnya bisa mencapai level partisipasi interaktif. Hal ini merujuk pada [9] bahwa terdapat enam level partisipasi yaitu mulai dari partisipasi nominal seperti menjadi anggota kelompok. Sebab itu kami membentuk wadah atau ruang partisipasi melalui KWT. Dari sini terbentuk partisipasi pasif, lalu ada partisipasi konsultatif, kemudian ada partisipasi dalam berbagai aktifitas tertentu yang hal ini berikatan dengan perempuan didorong atau dengan penuh kesukarelaan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu. level selanjutnya adalah partisipasi aktif dimana perempuan secara sadar untuk terlibat dan bersuara. Terakhir adalah terjadi partisipasi yang bersifat interaktif yaitu suara atau kepentingan perempuan dipertimbangkan, didengarkan dan mempunyai pengaruh. Pada bagaian ini perempuan pada akhirnya memiliki kuasa atau wewenang dalam pembuatan keputusan atau kebijakan dalam suatu komunitas.

Dalam upaya membangun ruang partisipasi di atas berikut langkah kerja yang kami lakukan yaitu mulai dari observasi, diskusi kampung, pembentukan KWT, pengabdian dan kolaborasi para pihak membangun ruang partisipasi perempuan.

3.1. Kegiatan Observasi

Menemu-kenali adanya masalah berbasis gender karena minimnya ruang partisipasi bagi perempuan di Desa Tallambalao dalam konteks pengelolaan kawasan hutan secara formal. Hal ini dimulai dari pengamatan kami ketika pertama kali bekerja di desa ini yaitu pada tahun 2022 kami melakukan kegiatan pengabdian "Alih teknologi budidaya aren untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani hutan Bura Sendana" (Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan pengabdian pertama sekaligus observasi persoalan gender dalam pengelolaan kawasan hutan

Dalam kegiatan pengabdian awal untuk meningkatkan kapasitas teknis petani dalam mengelola hasil hutan, kami menyadari jika keterlibatan perempuan sangat minim. Hal ini karena keanggotan perempuan dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) terbatas. Perempuan di desa ini juga belum terbiasa hadir dan terlibat dalam berbagai pelatihan atau kegiatan yang dianggap sebagai ranah publik. Pengelolaan perhutanan sosial dianggap sebagai arena publik yang sebagai domain laki-laki sehingga hal ini menjadi salah satu yang membatasi partisipasi perempuan [7]. Padahal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diperlukan partisipasi yang memadai dari mitra yang akan memperoleh pendampingan sehingga bisa berjalan dengan baik [10]. Kami memandang salah satu hal mendasar yang penting adalah keseimbangan tingkat partisipasi baik perempuan maupun laki-laki.

Observasi langsung ini membuat kami berpikir untuk membuat rencana tindak lanjut pasca pengabdian pertama tersebut untuk membangun ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan kerja pengabdian di Desa Tallambalao pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2023.

3.2. Diskusi Kampung

Pelaksanaan kegiatan diskusi kampung sebagai medium untuk membangun percakapan yang inklusif bagi seluruh pihak. Memastikan bahwa apa yang kami identifikasi sebagai masalah ketika observasi juga memang dianggap sebagai masalah bagi warga. Kemudian merumuskan solusi dan alternatif bersama. Diskusi kampung ini digelar secara sederhana yang disesuaikan dengan kebiasaan sehari-hari warga ketika melakukan kumpul-kumpul, dan memungkinkan semua orang berbicara secara santai, terbuka perihal berbagai masalah, hambatan atau hal yang dipikirkan terkait peran perempuan dalam berbagai macam kegiatan khususnya dalam pengelolaan hutan dan pertanian di Desa Tallambalao.

Penyesuaian kegiatan dengan tradisi warga setempat memungkinkan perempuan jauh lebih mudah menyampaikan suara dan pendapatnya. Karena itu diskusi kampung menjadi salah satu metode kami dalam upaya membangun ruang partisipasi perempuan yang inklusif di desa. Dari diskusi kampung ini kami juga memetakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk membangun ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan di Desa Tallambalao.

3.3. Membangun Ruang Partisipasi Perempuan dengan Pembentukan KWT

Penelitian [11] yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa berbagai kegiatan pengabdian berhasil memberikan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan, serta mendorong kesetaraan gender, dan peluang berwirausaha bagi perempuan. Berangkat dari identifikasi masalah yang telah diperoleh melalui observasi langsung dan diskusi kampung, maka kerja pengabdian kami pada tahun 2023 fokus untuk membentuk KWT.

Tim dosen memfasilitasi dan menginisiasi pembentukan KWT Lindu dan mencapai kesepakatan bahwa KWT Lindu diketuai oleh ibu Sri Wahyuni, memiliki masing-masing satu orang yang menduduki jabatan sekretaris dan bendahara serta 15 (lima belas) orang anggota. Akhirnya perempuan di Desa Tallambalao belajar mengorganisir diri, membuat pertemuan, saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama untuk membentuk kelompok tani. Mereka mendiskusikan apa nama kelompoknya, bagaimana bentuk strukturnya, siapa yang harus menjadi ketua atau koordinator untuk memastikan kelompok tersebut dapat dapat mewujudkan dan mendukung kepentingan mereka bersama.

Proses merumuskan nama dan struktur kelompok bahkan telah menjadi ajang berlatih bagi perempuan di Desa Tallambalao untuk lebih berani bersuara dan berbicara di ruang publik. Membicarakan hal-hal diluar urusan keluarga dan dapur semata melainkan belajar membangun organisasi bersama walau levelnya masih sangat sederhana dan kecil.

Proses mendorong ruang partisipatif bagi perempuan ini dimungkinkan karena terdapat kerja kolaboratif antara Perguruan Tinggi dalam hal ini dosen-dosen yang melakukan kerja pengabdian di Desa Tallambalao, kemudian didukung oleh pemerintah desa, lalu terdapat KTH yang juga melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan HKM dan hasil hutan, terakhir tentunya kehendak dan keinginan perempuan dalam Desa Tallambalao itu sendiri yang merasa perlu terlibat dan bersedia menangani proses pembelajaran bersama dengan terlibat dalam berbagai kegiatan hingga akhirnya terbentuk Kelompok Wanita Tani Hutan (KWTH) Lindu.

Pembelajaran paling penting dari proses membangun wadah bagi pembesaran ruang partisipasi perempuan di desa adalah prosesnya yang telah menjadi medium belajar itu sendiri dalam proses menguatkan posisi partisipasi perempuan. Selain itu konsekuensi dari kelembagaan ini yang memungkinkan kami untuk melakukan kerja pengabdian lebih lanjut yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan perempuan di desa.

Selanjutnya kelompok perempuan yang telah terbentuk ini menyusun rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan *Soft skill* dan *Hard skill* dalam pengelolaan

sumber daya hutan. Sehingga berikutnya beragam pelatihan dan kegiatan terkait proses produksi terutama pengelolaan pasca panen atas setiap jenis hasil produksi unggulan yang ada di desa perlu dilakukan.

Selain itu, tim pengabdian ini menjalin kerjasama jangka panjang dengan pihak desa untuk menjadi desa mitra sebagai laboratorium sosial dalam menerapkan ragam bentuk teknologi dan pengetahuan terbaru, serta rekayasa sosial berdasarkan pada kesepakatan kelompok perempuan, pemerintah desa dan komunitas setempat. Tujuannya agar terwujud desa mandiri dan sejahtera, tanpa ada warga yang tertinggal baik laki-laki maupun perempuan karena kegiatan pengabdian ternyata terbukti bisa menjadi arena untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang menjadi mitra, selain itu merupakan medium untuk melakukan inovasi bersama dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikelola sebagai peluang sumber pendapatan baru bagi masyarakat [12].



Gambar 2. Salah satu rangkaian aktivitas pengabdian dalam proses pembentukan KWT di Desa Tallambalao

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mendorong terbentuknya Kelompok Wanita Tani Hutan di Desa Tallambalao. Kemudian disepakati rencana tindak lanjut berikutnya berdasarkan pada identifikasi kebutuhan pengembangan KWT yaitu melakukan pelatihan untuk penguatan kelembagaan KWT yang sudah terbentuk agar mandiri dan berkelanjutan. Selain itu akan dilaksanakan pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian dari kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas pasca panen dan meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka panjang pengetahuan dan *Skill* yang diperoleh para KWT diharapkan mampu mengoptimalkan peran perempuan dalam pengelola hasil pertanian dari kawasan hutan.

Karena itu, temuan penting dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menegaskan pentingnya posisi kelembagaan seperti KWT sebagai "*Role of the game*" untuk menampakkan dan menguatkan posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Inisiatif pembentukan kelembagaan seperti KWT terkadang membutuhkan kolaborasi dan partisipasi banyak pihak untuk mewujudkannya. Penciptaan ruang partisipasi seperti KWT ini yang dapat mendorong pelibatan seluruh kelompok masyarakat (khususnya perempuan) menjadi semakin terlihat dan signifikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sulawesi Barat atas dukungan pendanaanya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pembentukan KWT di Desa Tallambalao.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan serta analisis hasil dampak pengabdian oleh tim pengabdi yang terdiri K, WU, IK, dan SD; Penyusunan artikel oleh K dan IK; Pengumpulan data, literatur serta revisi artikel oleh WU dan SD.

Daftar Pustaka

1. Kasmiati K, Oktaviana G. Perlawanan harian perempuan untuk percepatan kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). *J Peremp.* 2022;27(1):29–41.
2. Nurmayasari D, Ilyas. Peran anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri pada peningkatan kesejahteraan keluarga (studi deskriptif di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). *J Non Form Educ Community Empower.* 2014;3(2):16–21.
3. Priyadi PT, Setiawan I, Isyanto AY. Peran kelompok wanita tani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pada Kelompok Wanita Tani Puncaksari di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar). *J Ilm Mhs Agroinfo Galuh.* 2021;8(2):284.
4. Ardiani FD, Dibyorini MCCR. Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) “ASRI” Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. *SOSIO PROGRESIF Media Pemikir Stud Pembang Sos.* 2021;1(1):1–12.
5. Cornish F, Breton N, Moreno-Tabarez U, Delgado J, Rua M, de-Graft Aikins A, et al. Participatory action research. *Nat Rev Methods Prim.* 2023;3(1):34.
6. Maryani D, Nainggolan RRE. *Pemberdayaan masyarakat.* 1st ed. Yogyakarta; 2022. 237 p.
7. Tobing SF, Maharani C, Napitupulu L, Yulindra Affandi D, Jasnari. Partisipasi perempuan dalam hutan adat: Studi kasus di Sumatra Selatan & Riau. *World Resources Institute.* Jakarta: WRI Indonesia; 2021. 28 p.
8. Parera K eta, Pellondo'u M, Mau AE. Analisis peran gender dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sisimeni sanam. *J Wana Lestari J For.* 2023;5(2):300–8.
9. Agarwal B. Participatory exclusions, community forestry, and gender: an analysis for South Asia and a conceptual framework. *World Dev.* 2001;29(10):1623–48.
10. Suherman S, Suroso B, Yusuf M, Ilmi, M. Amirul, Harahap M. Pemberdayaan kelompok tani wanita Desa Stabat Lama Barat dengan pelatihan pembuatan asap cair. *Aksiologi J Pengabdi Kpd Masy.* 2023;7(4).
11. Yuanti Y, Rostianingsih D, Khirina S, Solina E, Antesty S, Sabaruddin EE, et al. Pemberdayaan perempuan melalui program pengabdian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah: menciptakan kesetaraan gender dan kesempatan berwirausaha. *J Pengabdi West Sci.* 2023;2(6):451–9.
12. Kadarisman Y, Angraini E, Aditya Z, Dayana ED, Sahfitri O, Ramadhanti AN, et al. Pemberdayaan kelompok perempuan melalui pemanfaatan potensi hutan. *Communnity Dev J J Pengabdi Masy.* 2023;4(4):7926–32.